

PERAN PPAT DALAM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERKAIT FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH DI KABUPATEN SRAGEN

Sri Prihartini
NIM. MKn.03IX170452

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam alih fungsi lahan pertanian terkait fungsi sosial atas tanah di Kabupaten Sragen serta menganalisis hambatan-hambatan dan solusi peran PPAT dalam alih fungsi lahan pertanian terkait fungsi sosial atas tanah di Kabupaten Sragen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sragen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa: (1) Peran PPAT dalam alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Sragen adalah membantu Kantor Badan Pertanahan setempat dalam mencocokkan data atau inventarisasi data yang meliputi objek tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan, batas-batas tanahnya, subyek atau pemilik/pemegang hak atas tanah dan penguasaan tanah serta penggunaannya, termasuk bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang akan terkena pembangunan sebagaimana terdapat dalam sertifikat milik masyarakat tetapi PPAT tidak membuatkan akta peralihan hak seperti dalam praktek jual beli tanah pada umumnya, karena kewenangan untuk melakukan peralihan hak atas tanah adalah panitia pengadaan tanah. Hal ini dikarenakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum sehingga ada mekanisme atau prosedurnya tersendiri, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (2) Peran PPAT dalam alih fungsi lahan pertanian terkait dengan fungsi sosial atas tanah, khususnya untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Sragen tidak menemui hambatan yang berarti, karena dalam inventarisasi data kepemilikan hak atas tanah masyarakat telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, apabila kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku, maka hal ini akan dapat mengatasi hambatan yang ada.

Kata kunci: Peran PPAT, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Fungsi Sosial Atas Tanah

**ROLE OF PPAT IN THE TRANSFER OF AGRICULTURAL LAND
FUNCTIONS RELATED TO SOCIAL FUNCTION OF LAND
IN SRAGEN DISTRICT**

**Sri Prihartini
NIM. MKn.03IX170452**

ABSTRACT

The purpose of this legal writing is to analyze the role of PPAT in the conversion of agricultural land related to social functions on land in Sragen Regency and to analyze obstacles and solutions to the role of PPAT in the conversion of agricultural land related to social functions on land in Sragen Regency.

This study uses a statute approach and a case approach and is included in the type of analytical descriptive research. The research location is in Sragen Regency. Data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by means of library studies, observations and interviews. The data analysis technique used is qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion it is known that: (1) The role of PPAT in the conversion of agricultural land for the construction of toll roads in Sragen Regency is to assist the local Land Agency Office in matching data or data inventory which includes land objects affected by land acquisition for development, boundaries the boundary of the land, the subject or the owner / right of the land and land ownership and its use, including buildings, plants and other objects related to the land that will be affected by the development as contained in the community certificate but PPAT does not make a deed of rights as in practice sale and purchase of land in general, because the authority to transfer land rights is the land acquisition committee. This is because land acquisition for the construction of toll roads is included in the category of development for the public interest so that there is a mechanism or procedure in its own right, namely in accordance with Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. (2) The role of PPAT in the conversion of agricultural land related to social functions on land, especially for the construction of toll roads in Sragen Regency does not meet significant obstacles, because in the inventory of data on community land rights ownership has been carried out in accordance with the procedures and procedures that apply . Therefore, if the activity is carried out in accordance with the procedures and procedures that apply, then this will be able to overcome existing obstacles.

Keywords: Role of PPAT, Transfer of Agricultural Land Function, Social Function on Land